

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹ Berdasarkan buku yang dikutip oleh Oos M. Anwas, Pemberdayaan menurut Parsons yaitu menekankan bahwa orang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain penting bagi mereka.²

Secara lebih rinci Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya

¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), 77.

² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.

tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya masyarakat untuk membangun keterampilan dan pengetahuan dalam memperbaiki kehidupannya agar tercipta kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melatih individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Maksud dari kemandirian ini yaitu kemandirian untuk berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang akan dilakukan.³

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah konsep yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*). Dari segi istilah kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan sesuatu dengan apa yang mereka inginkan dengan diri mereka sendiri. Kemampuan ini sangat baik untuk mengatur diri sendiri, mengendalikan orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan potensi atau keinginan orang lain. Dengan kata lain bahwa kekuasaan sebagai objek pengaruh atau keinginan dari orang lain.⁴

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna kesetaraan, adil dan demokrasi tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas

³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), 80.

⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 48.

atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu mandiri dan sejahtera.⁵

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabeling*),
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*);
- c. Melindungi⁶

Konsep pemberdayaan yang dianut oleh Rasulullah SAW menggambarkan prinsip keadilan, persamaan, partisipasi dan keikutsertaan dalam masyarakat. Sejak awal pemerintahan Rasulullah SAW sikap toleransi yang sejati selalu dipertahankan sehingga memiliki prinsip untuk selalu menjunjung tinggi etos kerja, saling tolong-menolong (*Ta'awun*) dimana semua warga untuk menjalankan

⁵ Ibid., 50.

⁶ Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 37.

ajaran agamanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ج وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (*fa'i*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta ia jangan hanya sekedar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.⁷

Maksud ayat tersebut adalah Apa saja harta rampasan atau *fa'i* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang datang dari penduduk kota seperti tanah Shafra, lembah Al-Qur'an dan tanah Yanbu' (maka Allah untuk Allah) dia memerintahkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (untuk para Rasul, orang-orang yang memiliki) atau memiliki (kekerabatan) yaitu kerabat Nabi antara Bani Hasyim dan Bani Munthalib, (yatim piatu) yaitu anak-anak muslimin yang ayahnya meninggal dunia dalam kemiskinan, (orang miskin) yaitu kaum muslimin yang serba kekurangan, (dan orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu kaum muslimin yang melakukan perjalanan kemudian berhenti ditengah jalan karena kehabisan bekal,

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: UD. Fatwa, 2017), 436.

yaitu harta fa'i itu adalah hak Nabi SAW. Beserta empat golongan orang-orang baik, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam pembagiannya, yaitu untuk masing-masing dari empat golongan tersebut, seperlima dari dua golongan sisanya menjadi milik Nabi SAW.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak belakang dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.⁸

Model pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada masyarakat disampaikan dalam program yang dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana kegiatan di lapangan didasarkan pada inisiatif yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Termasuk dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pelaksanaan pembangunan. Menurut Wrihatnolo, model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai dengan membangun kesadaran ekonomi

⁸ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 79.

masyarakat, penguatan kapasitas, dan memberikan pencerahan kepada mereka yang ingin diberdayakan.⁹

4. Tipe-Tipe Pemberdayaan

Berdasarkan buku yang dikutip oleh David Clutterbuck dan Susan Komaghan, bahwa menurut Bowen dan Lawler ada tiga tipe pemberdayaan diantaranya:

a. *Suggestion Involvement*

Karyawan didorong untuk memberikan ide-ide dalam program rekomendasi formal atau lingkungan berkualitas, namun aktivitas kerja sehari-hari mereka tidak banyak berubah. Mereka hanya diberdayakan untuk merekomendasikan, biasanya manajemen mempertahankan kekuasaan untuk memutuskan apakah hendak mengimplementasikan ide-ide yang mereka berikan atau tidak.

b. *Job Involvement*

Disini pekerjaan ditata kembali sehingga para karyawan dapat menggunakan berbagai keterampilan. Karyawan memiliki kebebasan yang cukup besar untuk memutuskan bagaimana melakukan pekerjaannya karena percaya bahwa pekerjaannya itu penting.

⁹ R.R Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 2.

c. *High Involvement*

Organisasi ini memastikan bahwa karyawan tingkat terendah berpartisipasi dalam kinerja kelompok, tidak hanya dalam cara kerja yang mereka lakukan, tetapi juga dalam kinerja organisasi menyeluruh.¹⁰

5. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan melalui partisipasi, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pemanfaatannya secara langsung. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan.¹¹ Dalam buku Aprilia Theresia yang berjudul *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Yadav mengemukakan tentang adanya 4 macam kegiatan yang menunjukkan masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:¹²

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini berkaitan masyarakat harus menemukan alternatif untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai ide yang bermanfaat bagi semua orang. Partisipasi seperti ini sangat penting karena masyarakat diminta untuk berpartisipasi dan

¹⁰ David Clutterbuck dan Susan Komaghan, *The Power of Empowerment (Release the Hidden Talent of your Empolyess)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), 8.

¹¹ Khairul Rahman, *Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Universitas Islam Riau (Jurnal Wedana: Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016), 193.

¹² Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 198-200.

orientasi pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dapat berupa: menghadiri pertemuan, diskusi, menyumbangkan ide, atau menanggapi atau menolak program.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi ini merupakan rencana yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan. Sangat penting bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan program, terutama pemerintah sebagai pusat atau sumber utama pembangunan.

c. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan

Kegiatan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat penting. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan umpan balik tentang masalah dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Program secara keseluruhan memerlukan partisipasi. Tujuan partisipasi ini adalah untuk mengetahui apakah rencana program telah dipenuhi atau tidak.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan hasil pembangunan adalah tujuan utama. Dengan memanfaatkan hasil pembangunan, masyarakat akan

lebih termotivasi dan bersemangat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan yang akan datang.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, sehingga setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut buku yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, berdasarkan penelitian Suharto tentang strategi pemberdayaan masyarakat, ada lima aspek penting pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan, terutama melalui pendidikan dan advokasi pada masyarakat miskin, antara lain:¹³

a. Motivasi

Dalam hal ini, setiap keluarga harus mampu memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan, memahami hak-haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah tangga harus didorong untuk membentuk kelompok, yang merupakan mekanisme kelembagaan yang penting untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian didorong untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan

¹³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 170.

pendapatan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan dasar, kesehatan, imunisasi dan vaksinasi. Sedangkan dapat juga mengembangkan keterampilan profesional dengan berpartisipasi. Pelatihan ini membantu masyarakat miskin dengan menciptakan mata pencaharian mereka sendiri atau meningkatkan keterampilan mereka untuk mencari pekerjaan.¹⁴

c. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat memilih pemimpinnya dan mengatur kegiatannya sendiri, seperti mengadakan pertemuan, pembukuan dan pelaporan pengelolaan simpan pinjam, menyelesaikan perselisihan dan mengelola dana bersama. Pada tahap awal, pendamping eksternal dapat membantu mereka dalam mengembangkan sistem. Kelompok kemudian dapat memberikan wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengelola sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumber daya

Mobilisasi sumber daya masyarakat memerlukan pengembangan cara untuk mengumpulkan sumber daya individu melalui tabungan rutin dan kontribusi sukarela untuk menghasilkan

¹⁴ Ibid., 171.

modal sosial. Gagasan ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai sumber dayanya sendiri yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara signifikan. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber daya perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat memastikan kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Penyelenggaraan kelompok swadaya masyarakat dengan meningkatkan kemampuan anggota untuk membangun dan mempertahankan jaringan sistem sosial yang berbeda. Dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber daya dan memberdayakan untuk masyarakat miskin maka jaringan ini sangat penting digunakan.¹⁵

7. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Pemberdayaan dalam bahasa Arab yaitu sebagai *tamkin*, kata *tamkin* atau dengan kata lain bersifat *ma'nawi* yaitu kemampuan untuk bertindak sesuatu yang kokoh, mempunyai kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan kedudukan yang dapat dirasakan. Pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dipahami sebagai gambaran tentang pemberdayaan yang tidak terlepas dari wewenang individu atau kelompok yang menggunakan suatu kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan

¹⁵ Ibid., 172.

mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan suatu keberdayaan mereka yang digunakan.¹⁶

Tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya itu, Al-Qur'an memberikan ilustrasi yang indah, antara lain ayat yang menyatakan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24-25:

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

Artinya: “Tanaman yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, tanaman itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya”.¹⁷

Abdullah Yusuf Ali, seorang musafir kontemporer, ketika mengomentari ayat di atas, menyatakan bahwa setiap pohon yang besar mempunyai empat ciri khas, yaitu:

- a. Indah; memberikan kenikmatan kepada setiap orang yang memandangnya
- b. Kuat dan teguh (stabil); dia berdiri kuat walaupun diterpa badai sebab uratnya tertancap jauh ke dalam tanah
- c. Melindungi, mengayomi; karena dahan-dahannya menjulang tinggi, daunnya dapat menahan cahaya matahari, dan dengan sendirinya menaungi dan melindungi sesuatu yang ada di

¹⁶ Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, Cet. Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 75.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 259.

bawahnya, baik manusia, burung-burung maupun binatang yang lainnya.

- d. Berbuah; menghasilkan buah, yang memberikan keuntungan sepanjang masa.¹⁸

Islam mengakui kenyataan sosial masyarakat bahwa pada setiap tempat dan waktu terdapat golongan masyarakat yang kaya dan miskin. Adanya kelompok kaya dan kelompok miskin merupakan *Sunnatullah*.¹⁹ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71, berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْنِعْمَةً اللَّهُ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahayanya agar mereka sama. Maka mengapa mereka menghindari nikmat Allah”.

Adanya perbedaan tingkat kemampuan dalam masyarakat menunjukkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya di samping keterbatasan kesempatan dimilikinya. Keterbatasan kemampuan dan kesempatan ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepemilikan.²⁰ Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 19, berbunyi:

¹⁸ Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 38.

¹⁹ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 80.

²⁰ *Ibid.*, 81.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ

Artinya: “Masing-masing mempunyai tingkatan menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah memenuhi balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa adanya kelompok kaya dan kelompok miskin dalam masyarakat merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri sehingga keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kemampuan dalam masyarakat. Islam mengajarkan penataan hubungan berdasarkan prinsip keadilan sosial sehingga antara keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh yang menimbulkan konflik sosial.

Dalam pandangan Islam pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi dilakukan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Menurut al-Ghazali kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kegiatan sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jika kondisi itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Di sisi lain al-Ghazali menegaskan tiga alasan seseorang melakukan aktivitas ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan bagi diri dan keluarga dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian

penting dalam Islam, karena dengan melakukan hal itu umat Islam telah mempraktikkan nilai-nilai kepedulian dari ajarannya. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan peradaban yang bermartabat secara ekonomi.²¹

B. Pengelolaan Desa Wisata

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Suharsimin Arikunta, pengelolaan yaitu inti dari mengelola sedangkan mengelola diartikan sebagai tindakan yang dimulai dari pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kemudian dijelaskan bahwa pengelolaan adalah menciptakan sesuatu yang menjadi sumber perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan selanjutnya.²²

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

²¹ Achmad Saeful dan Sri Ramdhayani, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang, Jurnal Syar'ie, Vol. 3 Februari 2020, 13-14.

²² Suharsimin Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), 8.

Pengelolaan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat era dikembangkan. Sarana akomodasi, sumber daya manusia (SDM), produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemasan. Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif dari berbagai aspek kehidupan baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak yang dihasilkan dari bidang ekonomi, sosial, budaya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata, adapun dampak tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wisata

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, prinsip-prinsip kepariwisataan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai-nilai budaya merupakan perwujudan konsep hidup dalam hubungan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, agama, budaya dan kearifan lokal;

- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
- e. Memberdayakan masyarakat lokal.²³

3. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan desa yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata yang memiliki ciri khas dan keunikan berdasarkan ciri fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya, yang pengelolaannya secara alami melalui pengembangan sarana pendukung wisata dan tata kelola yang baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.²⁴

Menurut Muliawan, Kriteria desa wisata adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata yang unik dan berkarakteristik (sebagai tujuan wisata), baik berupa karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
- b. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung wisata terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang meliputi:

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

²⁴ T. Prasetyo Hadi Atmoko, *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman* (Jurnal Media Wisata, Volume 12, Nomor 2, November 2014), 147.

akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya.

- c. Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut.
- d. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan desa wisata (sebagai desa wisata).²⁵

4. Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan buku yang dikutip oleh W.JS Poerwadarminta Pengembangan menurut Poerwadarminta adalah suatu proses metode yang mengarah pada suatu kemajuan, sempurna dan bermanfaat.²⁶

Desa wisata menurut tingkat perkembangannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Desa wisata embrio merupakan desa dengan potensi wisata yang bisa dikembangkan sebagai desa wisata dan dapat diwujudkan melalui gerakan masyarakat untuk mengelola desa wisata.
- b. Desa wisata yang berkembang merupakan desa wisata berkembang yang pengelolaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang sudah mulai dilakukan promosi dan ada minat wisatawan penting untuk berkunjung.
- c. Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung wisatawan yang berkelanjutan dan pengelolaannya dilakukan secara profesional

²⁵ Ibid., 148.

²⁶ W.JS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 438.

dengan membentuk tim pengelola, seperti (BUMDEs), jenis desa wisata ini dapat melakukan promosi dan pemasaran yang baik.²⁷

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dilihat pada tingkat masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan tercapainya kehidupan yang lebih baik dari hasil pembangunan masyarakat, antara lain:²⁸

- a. Meningkatkan kemampuan dan pemerataan kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Meningkatkan standar hidup, pendapatan, pendidikan yang lebih baik, potensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan pilihan untuk individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 tahun 2009 dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya agar setiap warga negara untuk hidup layak dan berkembang, sehingga seseorang tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya.²⁹

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya,

²⁷ Dinar Wahyuni, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul* (Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9, No. 1 Juni 2018), 88.

²⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), 271.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

yaitu tercapainya tujuan hidup sejahtera, yang berarti dapat memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta kesehatan dan hubungan sosial dan dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya, misalnya mencari sumber daya dan meningkatkan serta mengembangkan kualitas hidup yang layak.³⁰

Menurut BKKBN, Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subyektif, sehingga faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan keluarga atau individu dengan tujuan dan standar gaya hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda.³¹ Kesejahteraan merupakan keadaan dimana semua kebutuhan jasmani dan rohani dari keluarga terpenuhi sesuai dengan standar hidup.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan

³⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 8.

³¹ BKKBN, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), 25.

memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.³²

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya susasana yang harmonis dalam bermasyarakat.³³

Secara nasional kesejahteraan keluarga diukur melalui kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur tingkat kesejahteraan terdapat 7 indikator yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Kependudukan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Fertilitas dan Keluarga Berencana
- e. Pola Konsumsi
- f. Ketenagakerjaan

³² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

³³ *Ibid.*, 25.

g. Perumahan dan lingkungan³⁴

3. Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*al-maqasid As-Syariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁵

Kesejahteraan menurut Islam didasarkan pada pandangan hidup yang komprehensif tentang kehidupan ini. Jadi, kesejahteraan dalam Islam memiliki dua arti, yaitu:³⁶

a. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, termasuk kebutuhan individu dan sosial. Wujud manusia meliputi unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu kebahagiaan harus menyeluruh dan menyeimbangkan kedua unsur tersebut.

³⁴ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, (Jurnal Geografi, , Vol. 9, No.1, 2017), 58.

³⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 4.

- b. Kesejahteraan di dunia dan diakhirat, karena kehidupan manusia pada umumnya hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia setelah kematian (akhirat). Kecukupan material di dunia ditunjukkan untuk mendapatkan kecukupan di akhirat. Jika keadaan ideal ini tidak dapat dicapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, karena itu adalah kehidupan yang abadi dan lebih berharga dibandingkan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam yaitu kebebasan dari rasa ketakutan akan penindasan, kelaparan, kehausan, penyakit, kebodohan, masa depan diri sendiri, orang yang dicintai dan lingkungan. Hal ini selaras dengan nikmat surga, yang antara lain dapat digambarkan sebagai peringatan Allah SWT kepada Alam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Thaha (20) ayat 117-119 berbunyi:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

(117) إِنَّ لَكَ أَلًا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا

تَضْحَى (119)

Artinya: “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”³⁷

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 321.

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah berfirman, untuk berhati-hatilah terhadap dia (Iblis). Dia akan berusaha mengeluarkan kamu dari surga, akibatnya kamu akan menjalani kehidupan yang sulit, melelahkan dan sengsara dalam mencari rezekimu. Karena sesungguhnya kamu berada di surga ini, dalam kehidupan yang sejahtera dan menyenangkan tanpa beban dan masalah.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni pemeliharaan agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*An-nafs*), keluarga atau keturunan (*An-nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*). Adapun yang dimaksudkan dari lima tujuan dasar diatas, yaitu:

a. Agama (*al-dien*)

Kewajiban agama harus dipenuhi karena hal ini penting, seperti menunaikan ibadah shalat lima waktu dan sebagainya. Jika dibiarkan maka akan berujung pada runtuhnya integritas umat beragama.³⁸ Hidup akan penuh kegelisahan jika tidak agama. Ajaran menjaga eksistensi agama dapat dilihat dari berbagai sudut

³⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 309.

pandang, meliputi keimanan, menunaikan ibadah sholat, menunaikan kewajiban puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji jika memungkinkan.³⁹

b. Hidup atau Jiwa (*An-nafs*)

Memelihara jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi seluruh kebutuhan dasar. Tujuan dari kebutuhan dasar ini adalah sebagai makanan untuk membantu menopang kehidupan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dalam membuka pintu jiwa manusia bisa terancam. Selain untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan jiwa, hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin peranan pemimpin.⁴⁰

c. Keluarga atau Keturunan (*An-nasl*)

Keturunan merupakan salah satu unsur yang harus dijaga dan tidak boleh diabaikan, sebab dalam ajaran Islam larangan zina juga merupakan kepedulian jiwa berupa menjaga keturunan, keturunan pada dasarnya memberikan generasi muda yang harus belajar sejak dini dan mengajarkan sopan santun dan etika.

d. Harta atau Kekayaan (*mal*)

Harta atau kekayaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, kekayaan menjadi tujuan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memelihara harta benda

³⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 225.

dapat dipertahankan dan seluruh kegiatan ekonomi halal dapat dilakukan tanpa menghilangkan hak orang lain.⁴¹

e. Intelek atau Akal (*Al-aql*)

Akal adalah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT. Oleh karena itu akal harus dijaga sebab akal juga merupakan bagian dari kehidupan jiwa. Fungsi dari akal sendiri yaitu untuk memberikan manfaat bagi orang lain dalam segala aspek, salah satunya aspek finansial. Aktivitas ekonomi tidak hanya menggunakan akal untuk mendorong keberhasilan. Namun aspek ini memerlukan pengetahuan atau pemahaman, pengetahuan dapat diperoleh melalui kegiatan yang memiliki tujuan yang bermanfaat, seperti menambah keterampilan dan wawasan. Hal tersebut mempunyai fungsi utama yakni melindungi dan memelihara pikiran.⁴²

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari

⁴¹ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 284.

⁴² Muhammad Yafiz, *Internalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra Ahkamli* (Januari, 2015), 108.

kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.⁴³

Al-Qur'an telah meyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَأَيُّعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambatan (ibadah)

⁴³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 283.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 603.

kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).⁴⁵

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebihan.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9, yaitu:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴⁵ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 390.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁶

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertaqwa kepada Allah.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi yang hanya bergantung kepada Sang Khaliq (bertaqwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah maupun kuat dalam hal ekonomi.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 79.

⁴⁷ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 391.